

ABSTRAK

Diskrepansi atas hasil konstruksi bangunan dan rendahnya mutu konstruksi menjadi topik yang menarik sejak awal orde reformasi, hal itu disebabkan oleh pengendalian mutu konstruksi yang belum berjalan sesuai seharusnya. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah kasus hukum yang melibatkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.. Dari laporan tahunan KPK pada periode 2004-2017 menunjukkan peningkatan kasus kegagalan konstruksi rata-rata 184 % per tahun dari 202 kasus, BPK pada periode yang sama melaporkan 232 kasus, terjadi peningkatan 104% per tahun. Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian PUPR berupaya memperkuat fungsi teknis kontrol mutu dengan mengembangkan peralatan uji mutu dan sumber daya manusia konstruksi yang kompeten.

Penelitian ini bermaksud merumuskan kesepahaman antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dengan Auditor dan Penyidik terhadap diskrepansi mutu pekerjaan konstruksi bangunan publik, dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis tentang faktor-faktor diskrepansi, serta merumuskan pengertian diskrepansi dengan mengembangkan *framework* investigasi mutu pekerjaan konstruksi bangunan publik yang dapat diterima Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Auditor dan Penyidik.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan melalui stakeholder proyek. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) faktor diskrepansi mutu adalah biaya, waktu dan mutu. Mutu meliputi syarat administrasi, syarat teknis dan volume; (2) diskrepansi adalah ketidaksesuaian antara hasil pelaksanaan konstruksi dengan kontrak atas hasil audit investigasi mutu oleh Auditor dan Penyidik dengan uji dan perhitungan teknis oleh Ahli Konstruksi Bangunan; (3) *framework* investigasi mutu dengan melihat diskrepansi pada dua perspektif audit mutu: pertama, audit menurut kontrak kerja apabila terjadi perbedaan hasil pelaksanaan dengan kontrak harus diselesaikan dengan penyelesaian (resolusi) dengan denda senilai dengan ketidaksesuaian yang terjadi. kedua, hasil audit teknis menurut pertimbangan Ahli Konstruksi Bangunan dan penyelesaiannya melalui pengadilan Tipikor. Indikasi diskrepansi pada perspektif kedua hanya ada dua keputusan, selesai atau proses penyelesaian perselisihan (*dispute*) dan jika persoalannya dibawa ke pengadilan maka termasuk pada ranah perdata.

Kata kunci: *framework*,. investigasi mutu, bangunan publik dan diskrepansi.

ABSTRACT

The discrepancy over the results of building construction and the low quality of construction has been an interesting topic since the beginning of the reform order, this was due to the quality control of construction that had not yet proceeded accordingly. This was marked by an increase in the number of legal cases involving Service Users and Service Providers. From the annual report of the KPK in the period 2004-2017 it showed an increase in cases of construction failures averaging 184% per year from 202 cases, the BPK in the same period reported 232 cases, there is a 104% increase per year. Therefore the government through the Ministry of PUPR seeks to strengthen the technical functions of quality control by developing competent quality testing and construction human resources.

This study intends to form an understanding between Service Users and Service Providers with Auditors and Investigators on the quality discrepancy of public building construction work, with the aim of identifying and analyzing discrepancy factors and formulating an understanding of discrepancy by developing an acceptable framework for investigating the quality of public building construction work. Service User, Service Provider, Auditor and Investigator.

Research data is collected by means of field observations and structured interviews with through project stakeholders. The data was analyzed using case study analysis. The results of this study are: (1) the factor of quality discrepancy is cost, time and quality. Quality includes administrative requirements, technical requirements and volume; (2) a discrepancy is a discrepancy between the results of the implementation of construction and a contract on the results of a quality investigation audit by the Auditor and Investigator with a technical test and calculation by a Building Construction Expert; (3) quality investigation framework by looking at discrepancies in two quality audit perspectives: first, the audit according to the work contract in the event of a difference in the results of the implementation with the contract must be resolved (resolution) with a fine worth the nonconformity. second, the results of the technical audit according to the considerations of the Construction Expert and its resolution through the Corruption Court. An indication of discrepancy in the second perspective is that there are only two decisions, completed or the process of dispute resolution and if the problem is brought to court it is included in the civil domain.

Keywords: framework ,. quality investigation, public buildings and discrepancies.